

MENJAGA KEUTUHAN BANGSA:

Antara Pluralitas dan Spirit “*The Unlimited Ocean Of Love*”¹

Moh. Toriqul Chaer
Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta
toriqul_74@yahoo.com

Abstract

Indonesia is a pluralistic nation (plural). Multiculturalism beckons the existence of plurality and difference. Understanding and management of pluralism and multiculturalism will generate a positive force for the development of the nation. Conversely, if it is not understood and managed properly, diversity and multiculturalism could be a destructive factor and a disaster trigger. Conflict and social violence that often occurs between groups of people are part of plurality and multiculturalism are not managed properly. Religious conflict as happened in Maumere (1995), Surabaya, Situbondo and Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Jakarta, Solo and Kupang (1998), Poso, Ambon (1999-2002), are not bit fatalities, but also has destroyed hundreds of places of worship (both churches and mosques) burned and destroyed. Similarly, notes of ethnics violence, such as certain ethnic violence in West Kalimantan (1933), Central Kalimantan (2000), it is needed preventive measures as early prevention, so that such events do not recur in the future. To achieve this goal, inclusive-intrinsic understanding of religion. Borrowing a term of Malinowski's thinkin wishfull; their beliefs are considered nil even though the truth of religion, but religion is still positive that was able to help the frustration and still has the potential to realize the social unity.

Key-words: *Pluralitas, Cara Beragama, Problema Sosial-Keagamaan*

¹ Penulis menggunakan istilah “*The Unlimited Ocean Of Love*” sebagaimana yang digunakan oleh Dr. Komaruddin Hidayat, dalam Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: moralitas agama dan krisis modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1998). “*The Unlimited Ocean Of Love*” merupakan proses meretas spiritualitas manusia dengan Yang Maha Kasih yang memunculkan kesadaran imperatif; komunikasi sosial yang bersifat memberi, melimpah kasih, bukan komunikasi yang bersifat dominatif-eksploitatif. Dalam pandangan mistikus, kualitas manusia dan kemanusiaan yang paling primordial adalah bahwa ia merupakan makhluk spiritual puncak ciptaan Tuhan dan oleh karenanya watak dasar manusia adalah bersifat baik, senantiasa merindukan kedamaian, kebahagiaan, hubungan cinta kasih dan selalu ingin berdampingan dengan Yang Maha Kasih. Tatkala seseorang berusaha mencintai sesamanya dan berusaha menciptakan kedamaian bagaikan arus sungai yang mengalir dari lautan kasih dan lautan damai yang tak terbatas.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, hal ini dapat dilihat dari keberagaman suku bangsa, bahasa lokal, agama, adat dan budaya yang ada. Suparlan² mengatakan bahwa masyarakat majemuk (*plural society*) adalah masyarakat yang terwujud karena komunitas-komunitas suku bangsa yang ada telah secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional.

John Sydenham Furnivall termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia masuk ke dalam kategori masyarakat majemuk (*plural society*). Masyarakat majemuk menurutnya adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.³

Bagi masyarakat plural, potensi konflik sangat dimungkinkan terjadi. Ragam konflik bisa bersumber dari berbagai hal, seperti: adanya konflik antar agama, konflik antar etnis, konflik antar budaya, konflik antar suku ataupun konflik kepentingan antar masyarakat dari daerah atau propinsi yang berbeda. David A. Nadler (1970) sebagaimana dikemukakan oleh Anoraga dan Thoha yang menyatakan bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi antara person atau individu dengan lingkungannya. Berbagai karakter yang diperlihatkan oleh individu sesuai dengan jabatannya tentunya akan berbeda-beda. Dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda.⁴

Interaksi individu dalam masyarakat plural, memungkinkan adanya klaim kebenaran (*truth claim*) dan watak missioner agama menjadi pemicu benturan kehidupan beragama dan timbulnya salah pengertian antar penganut agama. Hal ini dikarenakan setiap agama menyatakan ajarannya sebagai totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial.⁵

Pemahaman agama pada masyarakat Indonesia dipahami secara umum sebagai sistem kepercayaan, tingkah laku, nilai, pengalaman dan yang terinstitusionalisasi, diorientasikan kepada masalah spiritual/ritual yang disalingtukarkan dalam sebuah komunitas dan diwariskan antar generasi dalam tradisi. Penegasan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa konsekuensi dari pemahaman keagamaan yang kaku, tidak bersifat *scientific* justru akan memunculkan stigmatisasi negatif terhadap peran penting agama dalam relasi kemanusiaan. Stigmatisasi tersebut berpandangan bahwa agama identik dengan *dogmatism, rigidity, excessive self-blaming* dan *gender bias*.

²Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga Dan Hak Budaya Komunitas Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia," *Antropologi Indonesia* 66 (2001): 2.

³Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 39.

⁴Panji Anoraga and Sri Suyati, *Perilaku Keorganisasian* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 54; Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

⁵Komarudin Hidayat, "Ilmu Perbandingan Agama: Ketegangan Antara Dialog Dan Dakwah," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (1993): 11.

Malinowski sebagaimana dikutip Steenbrink, berpendapat bahwa agama adalah sebagai "*wishfull-thinking*"; walaupun keyakinan kebenaran agama dianggap nihil, namun masih bersifat positif yang mampu menolong rasa frustrasi dan masih berpotensi dalam mewujudkan persatuan sosial (*religion as a societal glue*).⁶

Secara sosiologis, pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pengaruh yang bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan (*integrative factor*) dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh yang bersifat destruktif dan memecah-belah (*desintegrative factor*). Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat.

Fungsi disintegratif agama meskipun memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan eksistensi pemeluk agama lain. Artikel ini mencoba mengurai atas permasalahan konflik sosial-keagamaan pada masyarakat Indonesia yang plural, yang memuat pertanyaan; (1) Pluralitas Masyarakat Indonesia; (2) Bagaimana pemahaman agama secara instrinsik; (3) Apa kontribusi agama dalam mengatasi problema sosial dalam kehidupan masyarakat?, Menjawab permasalahan diatas tentu bukan perkara mudah, hal ini dikarenakan konflik yang terjadi tidak hanya terjadi atas satu sebab, konflik yang mencuat ke permukaan bisa jadi memiliki keterkaitan sebab-akibat yang bersifat multi-dimensional. Artikel ini menggambarkan bagaimana tantangan peran agama pada masyarakat plural dan upaya meretas harapan; bagaimana seharusnya agama "hadir dan ada" menjadi solusi bagi problematika bangsa yang saat ini terus tergerus oleh perpecahan dan klaim kebenaran kelompok.

B. Kajian Pustaka

1. Pluralitas Masyarakat Indonesia, Selayang Pandang

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi pluralitas pada masyarakat Indonesia, yaitu: **Pertama**, keadaan geografik wilayah Indonesia yang terdiri atas kurang 3.000 pulau yang terserak di sepanjang *equator* kurang lebih tiga ribu mil

⁶Karel A. Steenbrink, *Mencari Tuhan Dengan Kacamata Barat: Kajian Kritis Mengenai Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 23; Malik Fajar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998), 187; Elizabeth Nottingham, *Agama Dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 31; Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur'an Tentang Keragaman Agama* (Jakarta: RMBOOKS & PSAP, 2006), 59.

dari timur ke barat, dan seribu mil dari utara selatan, merupakan faktor yang sangat pengaruh terhadap terjadinya pluralitas suku bangsa, agama di Indonesia. Pendapat tentang berapa jumlah sesungguhnya suku bangsa yang ada di Indonesia, terdapat berbagai pendapat yang beragam di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Sebagai contoh pendapat yang dikemukakan oleh Hildred Geertz misalnya, ia menyebutkan ada lebih kurang 300 suku bangsa yang mendiami wilayah di Indonesia, masing-masing dengan corak dan ragam bahasa, identitas kultural yang berbeda-beda.⁷

Kedua, yang menyebabkan adanya pluralitas pada masyarakat Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan, sehingga sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama dan pluralitas etnis di dalam masyarakat Indonesia. Secara geografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut hasil identifikasi pulau-pulau yang telah dilakukan, terdapat lebih kurang 17.508 pulau di seluruh Indonesia. Yang terinventarisasi 7.353 pulau bernama dan 10.155 pulau belum bernama di seluruh kesatuan Republik Indonesia.⁸

Ketiga, iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara, telah mengakibatkan pluralitas regional. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda, yakni daerah pertanian basah (*wet rice cultivation*) yang terutama banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah ladang (*shifting cultivation*) yang banyak dijumpai di luar Jawa. Keadaan ini mendorong adanya *eksodus* penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pengharapan perbaikan hidup.

Pluralitas agama atau kebhinekaan agama merupakan kenyataan aksiomatis (tidak bisa dibantah), dan merupakan keniscayaan sejarah (*historical necessary*) yang bersifat universal. Pluralitas agama harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia, yang tidak dapat dilenyapkan, tetapi harus disikapi dengan bijaksana. Pluralitas agama, budaya dan etnik masyarakat Indonesia pada satu sisi berpotensi melahirkan benturan, konflik, kekerasan, dan sikap anarkis terhadap penganut agama lain, akan tetapi pada sisi yang lain agama adalah wahana pemersatu bangsa.

2. Cara Beragama; Antara Instrinsik dan Ekstrinsik

Saat ini agama –seringkali- dijumpai hanya sebagai sesuatu yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Agama bukan untuk tuntunan kehidupan, agama hanya *something to use but not to live*. Orang berpaling kepada Tuhan, tetapi tidak berpaling dari dirinya sendiri. Agama hanya digunakan untuk menunjang motif- motif lain; kebutuhan akan status, rasa aman atau harga diri. Agama hanya dijadikan *kamuflase*, ia tidak menjadi *spirit* perubahan menjadikan hidup dan kehidupan yang lebih berarti. Allport dalam Rahkmat menyatakan cara

⁷Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: PT. Grafiti Press, 1982).

⁸O. C. Kaligis and O.C. Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan: mengapa kita kalah* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003), 8; Joenil Kahar, “Penyelesaian Batas Maritim NKRI,” *Pikiran Rakyat Cyber Media*, January 3, 2004, 1.

beragama seperti sebagai cara beragama yang ekstrinsik dan erat kaitannya dengan penyakit mental.⁹

Agama dari sudut pandang normatif senantiasa mengajarkan harmoni, kasih-sayang dan kerukunan antara sesama umat beragama, secara internal maupun eksternal. Secara internal terwujud dalam kerukunan dan toleransi diantara sesama pemeluknya secara eksternal adanya hubungan yang harmonis diantara pemeluk-pemeluk agama lain. Malinowski sebagaimana dikutip Steenbrink¹⁰ mengatakan bahwa agama adalah sebagai "*wishfull-thinking*" walaupun keyakinan kebenaran agama dianggap nihil, namun masih bersifat positif yang mampu menolong rasa frustrasi dan masih berpotensi dalam mewujudkan persatuan sosial. Dalam bahasa Durkheim "*religion as a societal glue*".¹¹

Beragama secara intrinsik adalah cara beragama yang menjadikan agama sebagai *comprehensive commitment* dan *driving integrative*, yang mengatur seluruh hidup manusia. Glock & Stark¹² mengatakan dalam agama terkandung beberapa dimensi keberagaman, salah satunya adalah dimensi pengalaman keagamaan (*the experience dimension or religious experience*). Salah satunya adalah agama dijadikan faktor pemadu, penyelarar (*unifying factor*), yang dapat menjalin harmonisasi kehidupan masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara serta menjadi *spirit* bagi perjuangan meretas tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Thomas Merton, dalam bukunya *Mysticism in the Nuclear Age*, berkata: "Anda tidak dapat mendatangkan kedamaian tanpa disertai amal saleh. Anda tidak dapat memperoleh tatanan sosial tanpa kehadiran kaum mistik, orang-orang suci dan nabi-nabi". Pendapat Merton menunjukkan bahwa dalam beragama dituntut - hadirnya- perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Adalah hal yang mustahil agama hadir tanpa wujud, tanpa adanya moralitas, kesalehan perbuatan, karena agama dan perbuatan bagaikan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan dalam kehidupan beragama manusia. Erich Fromm mengatakan bahwa beragama berarti paduan harmonisasi antara iman dan perilaku manusia yang terjalin utuh dalam seluruh aspek kehidupan yang dilakukannya secara sadar (*free conscious activity*).¹³

Dengan kata lain aktifitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktifitas yang tampak dan dapat dilihat mata, juga aktifitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.¹⁴

⁹Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi agama: sebuah pengantar* (Bandung: Mizan, 2003), 26.

¹⁰Karel A. Steenbrink, *Mencari Tuhan Dengan Kacamata Barat: Kajian Kritis Mengenai Agama Di Indonesia*, 23.

¹¹Please refer to Rasjidi, *Al-Djamiah*, May 1968.

¹²Charles Y Glock and Rodney Stark, *Christian Beliefs and Anti-Semitism* (New York: Harper & Row, 1966), 43.

¹³Erich Fromm, *Psychoanalysis and Religion* (Yale: Yale University Press, 1972), 59.

¹⁴Damaludin Ancok and Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 76.

3. Agama dan Problema Sosial-Keagamaan; Antara Harapan dan Tantangan

Diskursus problema sosial adalah memperbincangkan kondisi yang terjadi dan berpengaruh dalam kehidupan manusia di mana sebagian besar dari problema itu tidak disenangi oleh manusia dan bahkan berusaha untuk menghilangkannya, misalnya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Problema sosial merupakan tantangan hidup yang harus dihadapi oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.

Problema sosial bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain jika komunikasi antar budaya tidak dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat plural, sementara komunikasi budaya sangat diperlukan dalam menciptakan kehidupan yang damai. Sehubungan dengan itu, komunikasi antar budaya diperlukan apabila : (1) Terjadi mobilitas manusia yang semakin tidak dapat dibendung, (2), Saling ketergantungan alam, (3) Kemajuan komunikasi dan informasi, (4) Terjadi migrasi dan transmigrasi yang cukup tinggi, (5) Ketidak pastian politik, dan (6) Jika ada usaha menciptakan perdamaian.

Pada era kemajuan teknologi dan komunikasi, peran umat beragama seharusnya tidak melulu tertuju pada ruang lingkup internal orang-orang seagama, melainkan mampu menjangkau masyarakat di luar agamanya. Masyarakat yang terus menerus mengalami proses globalisasi, menimbulkan transformasi komunikasi dan informasi sehingga berdampak terhadap perubahan nilai-nilai sosial serta budaya, dan lain-lain. Dan, ketika masyarakat berubah dalam menerima nilai-nilai baru yang didapat akibat bebasnya arus informasi. Pada kondisi seperti ini, umat beragama mengalami pengaruh bebasnya arus informasi dan mereka menggunakannya untuk berhadapan dengan penganut agama lain, hal inilah yang kemudian menjadi *trigger* benturan-benturan serta gesekan-gesekan.

Melihat fenomena ini Hidayat berpendapat bahwa saat ini fungsi dasar agama mengalami *deflection*, pembalikan, yaitu yang awal berfungsi sebagai jalan manusia untuk mencapai kebaikan, agama menjadi satu kenyataan sosial dan ajaran yang memaksa manusia untuk mencapai kebaikan, agama menjadi sautu kenyataan sosial dan ajaran yang memaksa manusia untuk mengikuti dan mentaatinya. Agama mengalami proses obyektivitas, yaitu agama menjadi sangat kering, formal, sempit dan ketat. Karenanya, pemeluk agama yang memiliki sikap keberagamaan semacam itu menjadi sangat sensitif, jika masalahkeyakinan dan keimanan terhadap ajaran agamanya terusik, apabila disalahkan atau dinilai sesat oleh orang atau sekelompok lain, sikap semacam inilah yang sangat rawan menimbulkan konflik antar pemeluk agama yang bisa menjalar ke seluruh aspek kehidupan.

Mensikapi problematika sosial-keagamaan, agama dan umat beragama seharusnya “ada” dan “hadir”. Konsekuensinya, umat beragama berperan dan harus terlibat serta melibatkan diri untuk mengatasi permasalahan sosial-keagamaan yang terjadi di masyarakat. Jika umat beragama hanya menfokuskan diri pada hal-hal yang hanya berhubungan dengan ibadah rutin, maka peran dan pelibatan diri tersebut tidak terlihat bahkan tak berdampak apa-apa pada orang lain serta masyarakat luas.

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa, kehadiran agama sebagai “titik strategis” oleh berbagai pihak dalam pembangunan, menunjukkan bahwa “peranan” tersebut lebih bersifat *superfisial*, atau tampak hanya di permukaan saja. Beliau lebih lanjut mengatakan bahwa kalau memang agama telah berperan cukup dalam pembangunan nasional kita, mengapa arah, wawasan dan moralitas pembangunan itu sendiri sangat terasa belum menyerap nilai-nilai keagamaan secara keseluruhan. Tidak dapat diingkari, justru nilai-nilai keagamaan yang mengalami erosi dahsyat dalam era pembangunan ini. Pola hidup konsumtif yang sebenarnya ditolak agama manapun, justru semakin berkembang, tanpa diimbangi oleh kemampuan yang cukup untuk meningkatkan produktifitas kerja sebagai bangsa, sehingga mendorong semakin meluas dan seriusnya korupsi.¹⁵

Dalam perkembangannya upaya pemecahan problema-problema sosial seperti yang disebutkan di atas membutuhkan pijakan normatif dan moral serta etis. Karena pada gilirannya pembangunan yang dilakukan harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan niurannya. Di sinilah kemudian aspek religius agama-agama memainkan peranan penting dalam pembangunan.¹⁶ Bila inti permasalahan pembangunan ialah mengatasi problema-problema sosial, tetapi dalam penanganannya seringkali tidak hendak menyentuh dimensi transendental dari masalah kesejahteraan dan keadilan.

Keberadaan agama sudah seharusnya menjadi “titik strategis”, yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan, semisal keterlibatan tokoh agama dalam berbagai aspek pembangunan. Mengembalikan otensitas pesan agama sebagai wahyu yang kultural agar agama dapat diimplementasikan di dalam dunia yang selalu berubah. Sebab, seringkali agama dimanipulasi untuk mengukuhkan eksistensinya dengan masa lalu tanpa merespons secara kreatif dengan dunia modern.

Sejatinya, agama yang tidak mengikuti makna kontekstualnya akan kehilangan eksistensi dirinya yang akomodatif terhadap perubahan. Bukankah, agenda agama-agama sejak awal diwahyukan adalah berdialog dengan problem sosial umat manusia? Karena itulah, mendialogkan agama dengan problem-problem sosial adalah suatu keniscayaan, karena agama tidak lahir dari ruang hampa. Ketika agama tidak disampaikan melalui budaya, ia akan memicu munculnya ideologisasi “semu” terhadap agama, yakni sikap keberagamaan yang berlebihan dan radikal. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak diajari untuk memahami, tetapi meyakini agama belaka. Agama hanya menjadi lambang eksistensi, ia lahir bukan dari sebuah refleksi kesadaran yang sesungguhnya, melainkan lebih merupakan upaya penguatan *status quo* agama itu sendiri.

Kesadaran masing-masing golongan beragama bukan pemikiran untuk meletakkan landasan bagi masyarakat, bangsa, negara dan kebudayaan Islam, Kristen Katolik maupun Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hucu, melainkan

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Aspek Religius Agama-Agama Di Indonesia Dan Pembangunan Dalam Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: LKPSM NU DIY dan Pustaka Pelajar, 1994), 3.

¹⁶M. Masyhuri Amin, *Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: LKPSM-NU-DIY, 1989), 8.

sumbangan pikiran dan aksi dalam kerangka tugas bersama untuk membangun masyarakat, bangsa, negara dan kebudayaan yang berasaskan Pancasila.¹⁷

Saat ini diperlukan dari masing-masing golongan ialah sumbangan pikiran yang pada satu pihak setia pada iman yang diyakini oleh masing-masing golongan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pihak lain dapat diterima oleh semua golongan dalam kerangka tugas bersama untuk membangun masyarakat, bangsa, negara dan kebudayaan yang berasaskan Pancasila. Sumbangan itu akan diterima tidak karena sumbangan pikiran itu berasal dari golongan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kong Hucu atau golongan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sumbangan pikiran tersebut memiliki kebenaran yang hakiki menurut penilaian semua golongan.¹⁸

C. Kesimpulan

Berdasar kajian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, dalam kehidupan di dunia ini, pluralitas sebagai sebuah keniscayaan bahkan sebagai *sunnatullah* yang sengaja diciptakan oleh Allah, oleh karenanya harus diakui oleh setiap orang. Dengan pluralitas di satu sisi sebagai khazanah kekayaan bagi sebuah bangsa yang dapat mendorong manusia untuk berkompetisi dalam mencapai kebaikan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain pluralitas dapat pula memicu dan menciptakan konflik yang berkepanjangan jika tidak disikapi secara baik. Sebagai konsekuensi sebuah bangsa yang pluralistik seperti Indonesia, tentunya tidak sedikit problema sosial yang muncul di permukaan yang perlu diatasi, di sini agama dengan ajarannya yang mulia dan paripurna mengatur segala aspek kehidupan manusia dapat memberikan kontribusinya dalam mengatasi problema sosial dimaksud.

Kedua, umat beragama peran umat beragama, seharusnya tidak melulu tertuju pada orang-orang seagama, melainkan menjangkau masyarakat di luar agamanya. Masyarakat yang terus menerus mengalami proses globalisasi, menimbulkan transformasi komunikasi dan informasi sehingga berdampak terhadap perubahan nilai-nilai sosial serta budaya, dan lain-lain. Dan, ketika masyarakat berubah serta menerima nilai-nilai baru yang didapat akibat bebasnya arus informasi.

¹⁷ Adagium "*Bhineka Tunggal Ika*" yang dilontarkan Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma yang menjadi landasan kehidupan multi kultural pada hakekatnya merupakan politik pembinaan dari dua madzhab besar, antara Hindu dan Buddha. Adagium tersebut tidak berarti telah terjadi sinkretisme antara Hindu dan Buddha sebagaimana kita dengar melainkan falsafah politik untuk mempersatukan berbagai unsur yang berbeda. Sujamto mengistilahkan Tantularisme sebagai istilah untuk pemahaman dari adanya sistem-sistem kepercayaan dan agama yang bermacam-macam itu adalah jalan-jalan yang berbeda menuju kepada tujuan yang sama, yaitu Tuhan. Tantularisme sama sekali bebas dari sektarianisme dan eksklusifisme, karena tidak membentuk "wadah" tersendiri dan tidak menciptakan "pagar" atau "kurungan" yang baru. Kebenaran bersifat (meminjam istilah Abdurrahman Wahid) "lintas batas". Lihat Sujamto., *Pandangan Hidup Orang Jawa: Reorientasi Dan Revitalisasi* (Semarang: Dahara Prize, 1992), 25–6, [//catalog.hathitrust.org/Record/002593813](http://catalog.hathitrust.org/Record/002593813).

¹⁸ TB. Simatupang, "Agama Dan Kebudayaan Nasional," in *Agama, Kebudayaan Dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 51.

Ketiga, umat beragama perlu berbuat lebih banyak lagi (karena pada umumnya mereka mempunyai kemampuan untuk itu). Itu berarti membutuhkan kemampuan penyesuaian dan mengatasi masalah serta dukungan lingkungan kondusif untuk berkembangnya nilai-nilai sosial dan budaya yang tanggap terhadap berbagai perubahan. Hal itu harus terjadi, karena adanya permasalahan sosial di/dalam masyarakat (konteks umat beragama berada).

Keempat, agama memberi kita arah kehidupan, mengajari kebebasan, dan mengerahkan wawasan agar hidup kita damai. Tuhan yang menurunkan agama, dengan tujuan agar kita tidak terjebak dan terperangkap ketegangan sosial dalam relasi antar sesama kita. Tidak juga dalam relasi orang-orang yang berbeda agama. Kita pun tak ingin hal itu terjadi. Maka, ada sejumlah landasan dasar yang mungkin membebaskan kita dari perangkap ketegangan itu. *Pertama*: kearifan untuk tak menonjolkan kebenaran mutlak agama kita sebagai kesadaran bahwa manusia memiliki sifat nisbi dan terbatas. Dengan begitu, ia tak bisa meraih tahap kemutlakan. Kebenaran mutlak agama memang wajib diakui dalam komunitas seagama. Itu pun, kenyataan sehari-hari, masih juga terganjal aneka ketegangan doktrinal karena perbedaan tafsir, pemaknaan ajaran, serta aspirasi keagamaan di kalangan umat yang sangat besar dan sangat plural. *Kedua*: agama diturunkan Tuhan sebagai sarana memuliakan kemanusiaan. Memuliakan manusia (menyantuni, memberi pertolongan, menghargai wawasannya) harus dinilai tinggi dalam pergaulan sosial. *Ketiga*: mengembangkan kemungkinan tampilnya agama sebagai tawaran nilai alternatif dan tawaran itu tak dipaksakan. Agama tak tampil untuk menguasai atau mendominasi, melainkan memberi kontribusi dalam mengatur hidup. Agama menjadi unsur penyejuk dalam pergaulan sosial-ekonomi dan politik. Melalui dan di dalam agama, kita mencari kedamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. *Aspek Religius Agama-Agama Di Indonesia Dan Pembangunan Dalam Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Damaludin Ancok, and Fuad Nashori Suroso. *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elizabeth Nottingham. *Agama Dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Erich Fromm. *Psychoanalysis and Religion*. Yale: Yale University Press, 1972.
- Glock, Charles Y, and Rodney Stark. *Christian Beliefs and Anti-Semitism*. New York: Harper & Row, 1966.
- Hendar Riyadi. *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur'an Tentang Keragaman Agama*. Jakarta: RMBOOKS & PSAP, 2006.
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas: moralitas agama dan krisis modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hilderd Geertz. *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT. Grafiti Press, 1982.
- Joenil Kahar. "Penyelesaian Batas Maritim NKRI." *Pikiran Rakyat Cyber Media*, January 3, 2004.

Menjaga Keutuhan Bangsa

- Kaligis, O. C, and O.C. Kaligis & Associates. *Sengketa Sipadan-Ligitan: mengapa kita kalah*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003.
- Karel A. Steenbrink. *Mencari Tuhan Dengan Kacamata Barat: Kajian Kritis Mengenai Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Komarudin Hidayat. "Ilmu Perbandingan Agama: Ketegangan Antara Dialog Dan Dakwah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (1993).
- Malik Fajar. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI, 1998.
- Mifta Thoha. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Masyhuri Amin. *Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: LKPSM-NU-DIY, 1989.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Panji Anoraga, and Sri Suyati. *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Parsudi Suparlan. "Kesetaraan Warga Dan Hak Budaya Komuniti Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia." *Antropologi Indonesia* 66 (2001).
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi agama: sebuah pengantar*. Bandung: Mizan, 2003.
- Rasjidi. *Al-Djamiah*, May 1968.
- Sujamto. *Pandangan Hidup Orang Jawa: Reorientasi Dan Revitalisasi*. Semarang: Dahara Prize, 1992. [//catalog.hathitrust.org/Record/002593813](http://catalog.hathitrust.org/Record/002593813).
- TB. Simatupang. "Agama Dan Kebudayaan Nasional." In *Agama, Kebudayaan Dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.